

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 hal 115-127

Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Kebijakan Hutang

Wulan Novianti¹, Eny Purwaningsih²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul Jakarta

noviantiwulan6@gmail.com¹, eny.purwaningsih@esaunggul.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the board of directors, board of commissioners and audit committee on debt policy. As well as the size of the board of directors, board of commissioners and audit committee on debt policy obtained from financial statement data listed on the Indonesian stock exchange for the 2018-2020 period. This study uses a type of causal observation that functions to identify cause and effect between two or more variables. The sample in this study is the food and beverage sub-sector industry listed on the IDX during the period 2018-2020 using the purposive sampling method. There are 13 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in accordance with the provisions or criteria of the research sample where the sample is 39 financial statements. The research method uses multiple regression analysis. The results of this study show that there is a simultaneous influence of the board of directors, board of commissioners, and audit committee on debt policy, the results also show that there is a partial influence of the board of directors that has no effect on debt policy, the board of commissioners and the committee audit have negative effect on debt policy.

Keywords: Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, Good Corporate Governance, Debt Policy.

PENDAHULUAN

Kebijakan hutang sebagai salah satu sumber pendanaan yang digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan (Hanafi *et. al.* 2018). Kebijakan hutang akan memotivasi manajemen untuk memaksimalkan pengelolaan kebutuhan operasional perusahaan agar tidak terjadi peningkatan hutang yang terlalu tinggi sehingga dapat memberikan pandangan yang buruk terhadap perusahaan karena memiliki tingkat hutang yang tidak stabil (Murtini, 2018). Oleh karena itu, hutang dapat dijadikan sebagai tanda atau sinyal positif untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan (Sunardi, 2019). Tingkat hutang yang berlebihan tidak baik karena dapat mengurangi keuntungan perusahaan, perusahaan terancam *default* apabila besarnya jumlah hutang lebih tinggi dibanding jumlah modal yang dimilikinya sehingga perusahaan terancam gagal bayar. Oleh sebab itu, perusahaan berupaya terhindari dari *default* melalui cara membuat kebijakan yang dapat menaikkan pendapatan ataupun keuntungan (Rizki, 2021). Salah satu industri manufaktur subsektor makanan dan minuman yang mempunyai tingkat hutang tinggi yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera (AISA) Tbk yang terdata memiliki total pinjaman dari tahun 2013-2016 sejumlah Rp.3,8 triliun atau nyaris tembus 100%, dan terancam pailit (www.market.bisnis.com).

Kepemilikan suatu perusahaan dapat dilihat dari konsep *good corporate governance* menjadi sistem eksternal yang terikat kuat dengan dewan komisaris dan dewan direksi (Sekaran *et. al.* 2018). *Good corporate governance* yang meregulasi relasi diantara dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit (Prayanthi dan Laurens, 2020). Dewan direksi sebagai individu profesional yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan dalam mengoperasikan serta memimpin suatu perusahaan (Novita dan Ardini, 2020). Dengan keberadaan dewan direksi sangat diperlukan untuk membangun

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 hal 115-127

konsep *good corporate governance*, karena dengan keberadaan dewan direksi dapat menentukan pengambilan keputusan dengan tepat untuk perusahaan (Aini *et. al.* 2021).

Dewan komisaris dapat mengawasi manajemen dalam menjalankan keberlangsungan perusahaan, dan sebagai kendali pengawas yang dilakukan manajemen lebih objektif (Prayanthi dan Laurens, 2020). Dewan komisaris yang berasal dari eksternal perusahaan memiliki tugas untuk melakukan penilaian performa kinerja dari segi keseluruhan atau luas, dimana dewan komisaris harus benar-benar objektif serta mampu menolak dampak tekanan maupun gangguan dari pemegang saham utama perusahaan yang mempunyai tujuan tertentu (Aini *et. al.* 2021).

Komite audit sebagai salah satu aspek pada konsep *good corporate governance* yang diekspektasikan dapat berkontribusi yang cukup tinggi untuk perusahaan (Agatha *et. al.* 2020). Keberadaan komite audit pada perusahaan diharapkan dapat memaksimalkan *checks and balance*, yang di akhir bisa ditujukan guna menghasilkan proteksi yang maksimal untuk pemangku kepentingan serta pemilik perusahaan (Agatha *et. al.* 2020). Komite audit yang independen bisa menjadi mediator saat terdapat permasalahan antara pihak pengelola dengan pemangku kepentingan, komite audit juga diharapkan lebih optimal untuk mengawasi pelaporan finansial dan dapat mengurangi tindakan kecurangan dalam laporan keuangan (Erlien dan Achmad, 2020).

Peneliti yang dilakukan Aini *et. al.* (2021) dengan variabel kepemilikan manajerial, dewan direksi dan dewan komisaris menjelaskan bahwasanya dewan direksi dan dewan komisaris memberikan pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu, peneliti terdahulu menggunakan variabel kepemilikan manajerial dan penulis menggunakan variabel komite audit yang berpengaruh terhadap kebijakan hutang, serta perusahaan yang digunakan peneliti terdahulu sub sektor industri pertambangan pada tahun 2014-2018 dan saat ini penulis menggunakan kategori subsektor makanan dan minuman yang terdata pada BEI dari tahun 2018 sampai 2020.

Penelitian ini dilakukan di industri sub sektor makanan dan minuman terkait dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit terhadap kebijakan hutang menunjukkan hasil yang variatif. Apabila dilihat dari uraian diatas dapat diketahui adanya perbedaan variabel penelitian terdahulu, oleh sebab itu peneliti hendak melakukan penelitian lanjutan mengenai variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan hutang. Berdasarkan hasil tersebut, penulis memiliki tujuan guna mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh dewan direksi, dewan komisaris serta komite audit terhadap kebijakan hutang.

KAJIAN TEORI

Trade-Off Theory

Trade-off theory menggambarkan hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan (Pasaribu, 2018). *Trade-off theory* mengasumsikan bahwa struktur modal perusahaan adalah hasil dari menimbang manfaat pajak dari penggunaan hutang terhadap biaya penggunaan hutang (Pasaribu, 2018). Inti dari *trade-off theory* dalam struktur modal adalah untuk menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan menggunakan hutang. Selama keuntungan lebih besar dari hutang tambahan masih dapat diterima. Pengorbanan yang disebutkan dalam *trade-off theory* adalah biaya kebangkrutan yang ditanggung oleh perusahaan (Umdiana dan Claudia, 2020). *Trade-off theory* yaitu ketika suatu perusahaan mendanai suatu investasi melalui modal hutang, dapat memperoleh keuntungan dari pembayaran bunga karena keuntungan dari sisi pajak mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Namun, selain insentif pajak, perusahaan menghadapi risiko kebangkrutan (Umdiana dan Claudia, 2020). Adapun keseimbangan antara risiko dan imbalan dalam teori *trade-off* adalah bahwa menggunakan banyak hutang meningkatkan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham, selama keuntungan lebih besar maka hutang tambahan akan dilakukan dan sebaliknya jika pengorbanan yang lebih besar karena penggunaan utang, maka tidak boleh ada tambahan utang (Nana dan Nurjanah, 2020). Teori *trade-off* mempunyai pertimbangan terhadap manajemen dalam kerangka *trade-off* antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan ketika menentukan struktur modal. Perusahaan yang memiliki keuntungan mencoba memastikan pajak yang lebih rendah dengan meningkatkan rasio *leverage*, seperti halnya utang tambahan yang menurunkan pajak. Model

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 hal 115-127

trade-off sangat logis dalam teori, tetapi bukti empiris untuk model ini belum terlalu kuat hasilnya (Nana dan Nurjanah, 2020). Teori *trade-off* menunjukkan bahwa tingkat utang yang optimal tercapai Ketika penghematan pajak mencapai puncaknya untuk biaya kesulitan keuangan, artinya ada keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan penggunaan akibat utang (Megawati *et. al.* 2021).

Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang adalah salah satu asal pembiayaan yang dimanfaatkan instansi guna mendanai keperluan operasional (Wardani dan Rumahorbo, 2018). Namun, pemakaian pinjaman bisa menaikkan *value* instansi, sebab instansi dinilai mempunyai kapabilitas memenuhi kewajiban serta masa depan yang baik (Wardani dan Rumahorbo, 2018). Dalam mengukur kebijakan hutang menggunakan rasio *leverage* adalah segala jenis hutang yang diciptakan untuk memenuhi biaya operasional perusahaan atau biaya lain-lain, baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang (Asim dan Ismail, 2019). *Leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara kewajiban dan modal perusahaan (Asim dan Ismail, 2019). Instansi yang mempunyai perbandingan tingkat hutang yang besar, artinya porsi pinjaman lebih besar daripada porsi modalnya. Kebijakan hutang mempunyai relasi positif atas probabilitas yang menjadi penyebab apabila pinjaman bertambah dimana risiko gagal bayar juga bertambah, maka dari itu instansi wajib memiliki kehati-hatian untuk mengelola tingkat pinjaman, sebab melalui pemanfaatan pinjaman instansi mempunyai risiko yang besar serta bisa membuat instansi sulit secara finansial hingga berujung pailit (Novita dan Ardini, 2020). Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi dapat mendapatkan ancaman *default* yakni perusahaan tidak mampu menjadi pemenuh tanggung jawab untuk membayar hutang tepat sesuai jatuh tempo. Oleh sebab itu, instansi berupaya untuk menghindari melalui cara pembuatan peraturan yang bisa menaikkan keuntungan ataupun penghasilan (Rizki, 2021).

Good Corporate Governance

Good corporate governance atau tata pengelolaan instansi merupakan sebuah mekanisme yang meregulasi relasi antara peran pemegang saham, direksi, serta komisaris maupun pemilik kepentingan yang lain (Ghozali, 2018). Pengelolaan instansi bisa digambarkan menjadi tahap yang terbuka untuk menentukan target, kinerja dan evaluasi kinerja instansi. *Good corporate governance* bisa dimanfaatkan sebagai alat guna mengurangi perselisihan antar agensi yang dapat mempengaruhi pada struktur modal perusahaan, karena sejatinya *good corporate governance* adalah tata cara yang memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas. Target dari tata kelola perusahaan yakni guna menghasilkan nilai lebih untuk seluruh pemangku kepentingan (Sunardi, 2019).

Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan badan usaha yang berfokus pada kepatuhan dan bertanggung jawab terhadap penerapan tata pengelolaan instansi guna meraih tujuan suatu instansi (Sekaran *et. al.* 2018). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33 Tahun 2014, tiap instansi publik diharuskan mempunyai paling tidak 2 anggota dewan direksi. Salah satu prinsip dewan direksi adalah menjalankan tugasnya secara efektif dan terstruktur sedemikian rupa agar dapat memfasilitasi keputusan kebijakan dengan cepat serta sesuai selain bisa mengaplikasikannya dengan mandiri (Sekaran *et. al.* 2018). Instansi yang memiliki total anggota dewan direksi yang cukup tinggi memiliki banyak pengetahuan dalam menjalankan bisnis untuk membantu manajemen melakukan pekerjaan dengan lebih efisien (Daromes dan Jao, 2020). Sebagai entitas utama, dewan direksi memiliki pertanggungjawaban dalam menentukan peraturan serta strategi jangka pendek dan jangka panjang, salah satu karakteristik dewan direksi yakni ukuran atau total anggota dewan direksi (Gennusi dan Maharani, 2021). Dewan direksi berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Karena, sebagai orang yang profesional, dewan direksi memiliki gambaran tentang keberlangsungan perusahaan dan pengalaman serta keahlian dewan direksi dapat berdampak pada manajemen dalam pengungkapan laporan (Novitasari *et. al.* 2021).

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 hal 115-127

Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki peranan utama untuk mengkoordinasikan strategi perusahaan, serta memastikan para manajer dan manajemen meningkatkan kinerja perusahaan (Sekaran *et. al.* 2018). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33 Tahun 2014, tiap instansi publik diharuskan mempunyai paling tidak 2 majelis atau dewan komisaris independent. Dewan komisaris berfungsi sebagai penasihat, memberikan saran dan pendapat terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan (Sekaran *et. al.* 2018). Dewan komisaris independen bertugas memonitor dan menyelesaikan konflik kepentingan di tingkatan dewan komisaris, anggota direksi, serta pihak pengelola (Ghozali, 2018). Dewan komisaris memiliki peranan utama guna memberikan kepastian strategi serta performa kerja instansi dikelola oleh manajerial instansi dengan sesuai serta tidak menimbulkan kerugian untuk investor maupun pemilik maupun *stakeholder* secara keseluruhan (Syahzuni, 2020). Sebab dewan komisaris tidak mempunyai relasi apapun dengan instansi terkecuali karena selaku tenaga ahli yang bertugas guna mengendalikan performa kerja instansi, maka dewan komisaris berwenang memberikan teguran bagi pihak pengelola saat manajer memberlakukan kebijakan yang berpotensi membahayakan eksistensi usaha (Indrati *et. al.* 2021). Dewan komisaris dapat menengahi perselisihan antara manajer internal, melakukan pengawasan peraturan dari pihak pengelola serta memberi saran untuk manajemen (Aini *et. al.* 2021). Dewan komisaris merupakan unsur utama dari *good corporate governance* yang dilimpahi tanggung jawab dalam memberi jaminan tata laksana strategi yang diaplikasikan oleh instansi, melakukan pengawasan pihak pengelola dalam mengatur instansi, mengharuskan penerapan akuntabilitas (Novitasari *et. al.* 2021).

Komite Audit

Komite audit merupakan golongan individu yang menurut kebijakan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) yang sudah diperbaharui dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minimal mencakup 3 individu komite audit yang bekerjasama guna mendukung dewan komisaris yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan kendali atas performa kerja instansi. Komite audit selaku komite fungsional, yang dibentuk dengan profesional serta berdiri tunggal oleh dewan komisaris sebagai peran guna mendukung serta meningkatkan tahap laporan finansial, pengelolaan risiko, audit dan pemantauan operasional instansi (Amaliyah dan Herwiyanti, 2019). Kehadiran komite audit membantu memastikan pengungkapan dan sistem sebagai media komunikasi perusahaan dengan pemangku kepentingan, dan standar penyelenggaraan rapat komite audit berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Undang-Undang Nomor 55/POJK.04/2015 yakni 4 kali dalam satu tahun. Eksistensi komite audit turut menghasilkan fungsi utama guna memberikan jaminan penciptaan *good corporate governance* yang sesuai di sebuah instansi (Aini *et. al.* 2021). Komite audit mempunyai tanggung jawab pemberian saran yang objektif untuk dewan komisaris atas pelaporan yang diberikan dari direksi untuk dewan komisaris (Prayanthi dan Laurens, 2020). Tidak hanya itu, komite audit juga memiliki tugas melakukan peninjauan aspek-aspek yang membutuhkan perhatian komisaris selain memiliki tanggung jawab pengawasan pelaporan finansial instansi, melakukan pengawasan audit eksternal serta kendali internal entitas (Prayanthi dan Laurens, 2020).

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

Hubungan Dewan Direksi Terhadap Kebijakan Hutang

Keberadaan dewan direksi didalam suatu perusahaan dapat berperan untuk mengawasi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh manajer (Sekaran *et. al.* 2018). Pengawasan yang optimal dapat menekan kebijakan menyimpang yang dilakukan oleh para manajer, sehingga para manajer tidak bisa mempermainkan tingkat hutang (Santosa, 2020). Hal ini berbanding lurus dengan studi yang dilakukan oleh Aini *et. al.* (2021) yang menjelaskan bahwasanya dewan direksi memberikan dampak negatif terhadap kebijakan hutang. Menurut penjelasan diatas, maka bisa diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 hal 115-127

Hubungan Dewan Komisaris Terhadap Kebijakan Hutang

Dewan komisaris berperan sebagai penasihat serta wajib menolak unsur tekanan maupun desakan dari investor utama yang mempunyai kepentingan pribadi atau atas transaksi yang dapat menguntungkan dirinya sendiri (Masithoh dan Dewayanto, 2020). Dewan komisaris tidak bertindak langsung dalam mengambil kebijakan suatu perusahaan salah satunya kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan hutang, tetapi pengawasan dari dewan komisaris dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh para manajer khususnya kebijakan yang menyimpang (Aini *et. al.* 2021). Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Sunardi (2019) yang menjelaskan bahwsanya dewan komisaris berdampak negatif terhadap kebijakan hutang. Menurut penjelasan diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

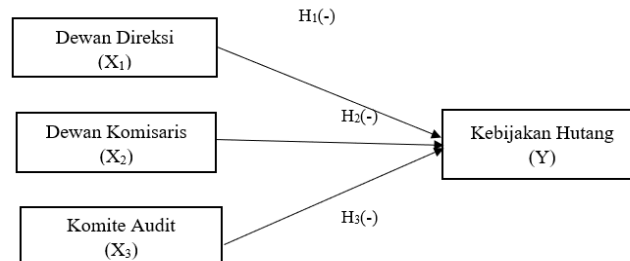
H₂: Dewan komisaris berdampak negatif terhadap kebijakan hutang.

Hubungan Komite Audit Terhadap Kebijakan Hutang

Komite audit sebagai struktur utama yang terdapat pada tata kelola perusahaan yang dijadikan sebagai harapan memberikan pengawasan yang baik dari pemilik kepentingan dalam memberikan batasan untuk kebijakan yang dilakukan oleh manajemen (Wardani dan Rumahorbo, 2018). Tanggung jawab komite yakni mendukung dewan komisaris untuk melaksanakan tugas mengawasi dimana hal itu meliputi ulasan atas kendali internal yang terdapat di sebuah perusahaan (Sunardi, 2019). Mutu pelaporan keuangan perusahaan serta efektifitas fungsi audit internal (Agatha *et. al.* 2020). Komite audit berpengaruh langsung dalam kebijakan hutang (Wardani dan Rumahorbo, 2018). Berdasarkan penjelasan diatas, maka bisa diajukan hipotesis menjadi:

H₃: Komite audit berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang.

MODEL PENELITIAN



Gambar 1.
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data perusahaan sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2018-2020. Studi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sehingga membutuhkan pengukuran dari setiap variabel. Variabel independen *good corporate governance* yang mencakup dewan direksi, dewan komisaris, serta komite audit dan variabel dependen yaitu kebijakan hutang yang diuji menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Kriteria dalam penelitian ini yaitu ukuran jumlah dewan direksi minimum terdapat 2 anggota dewan direksi, ukuran dewan komisaris minimum terdapat 2 anggota dewan komisaris dan rapat komite audit minimum diselenggarakan rapat 4 kali dalam satu tahun. Populasi pada studi ini merupakan industri sub sektor makanan dan minuman yang terdata pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 serta sudah mempublikasikan laporan keuangan, oleh sebab itu populasi dalam studi ini 26 industri dengan jumlah 78 data. Selain itu, studi ini menggunakan metode *non-probability sampling* dimana metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penelitian ini mengambil data pada industri sub sektor makanan dan minuman yang terdata pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 dengan jumlah 13 perusahaan selama 3 tahun, dengan total 39 data. Ketentuan sampel yang diambil pada survei ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 hal 115-127

yang terdata pada Bursa Efek Indonesia yang melakukan publikasi laporan keuangan selama periode 2018-2020, perusahaan yang memiliki dewan direksi, dewan komisaris serta komite audit pada perusahaan dan perusahaan yang memiliki data laporan keuangan yang lengkap khususnya terkait dengan kebijakan hutang.

Untuk tujuan menjalani penelitian menggunakan metode analisis data untuk memperlancar output yang sesuai kriteria dan relevan. Peneliti memilih menggunakan statistik deskriptif selanjutnya uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis diuji dengan uji F, selanjutnya uji t dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya, uji penelitian menggunakan model persamaan regresi berganda yaitu:

$$LEV = \alpha - \beta_1.DD - \beta_2.DK - \beta_3.KA + \varepsilon$$

Keterangan:

LEV	= Kebijakan Hutang
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi Berganda
DD	= Jumlah Dewan Direksi
DK	= Jumlah Dewan Komisaris
KA	= Rapat Komite Audit
ε	= Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Dewan Direksi	4	10	5,5385	1,7895
Dewan Komisaris	2	8	4,0256	1,6778
Komite Audit	2	9	4,7436	1,5169
Kebijakan Hutang	0,0283	1,5982	0,5243	0,4251
N	39			

Sumber: Data yang telah diolah SPSS (2022).

Berdasarkan dari hasil statistik secara deskriptif bahwa variabel dewan direksi mendapatkan nilai minimum sebesar 4, kemudian nilai maksimum sebesar 10, dan nilai *mean* sebesar 5,5385 dengan *standart deviation* sebesar 1,7895. Nilai dewan komisaris memperoleh nilai minimum 2, nilai maksimum sebesar 8, dan nilai *mean* 4,0256 dengan *standart deviation* 1,6778. Nilai komite audit memperoleh nilai minimum 2, nilai maksimum sebesar 9, dan nilai *mean* 4,7436 dengan *standart deviation* 1,5169. Variabel dependen kebijakan hutang memperoleh nilai minimum sebesar 0,0283, nilai maksimum sebesar 1,5982, dan nilai *mean* 0,5243 dengan *standart deviation* 0,4251. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa jumlah dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan kebijakan hutang selama periode 2018-2020 sangat bervariasi.

Uji Normalitas

Tabel 2.

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,34166922
Most Extreme Differences	Absolute	,058
	Positive	,058
	Negative	-,043
Kolmogorov-Smirnov Z		,364
Asymp. Sig. (2-tailed)		,999

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi),
url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----
Vol.4 No.2 hal 115-127

Sumber: Data yang telah diolah SPSS (2022).

Berdasarkan hasil dari pengujian secara normalitas yang diperoleh dari hasil olah data diketahui tingkatan signifikan berada di atas 0,5 yakni sebesar 0,999, artinya bahwa variabel secara residual memiliki distribusi secara normal, oleh karena itu pengujian asumsi secara klasik lain bisa dilanjutkan.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DD	,616	1,624
	DK	,561	1,782
	KA	,823	1,215

a. Dependent Variable: LEV

Sumber: Data yang telah diolah SPSS (2022).

Sesuai pengujian multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel secara independen mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10, dalam hal tersebut memberikan petunjuk jika ketiga variabel yang dimaksud tidak terjadi sebuah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,698	,108		6,483	,000
	DD	-,038	,019	-,348	-1,958	,058
	DK	-,007	,022	-,056	-,302	,764
	KA	-,039	,020	-,305	-1,989	,055

a. Dependent Variable: ABSRESID

Sumber: Data yang telah diolah SPSS (2022).

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa nilai signifikannya dewan direksi dengan *p-value* 0,058, dewan komisaris dengan *p-value* 0,764, komite audit dengan *p-value* 0,055, hal tersebut seluruh variabel menghasilkan *p-value* > 0,05 berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5.
Hasil Uji Autokorelasi

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 hal 115-127

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00322
Cases < Test Value	19
Cases >= Test Value	20
Total Cases	39
Number of Runs	18
Z	-.645
Asymp. Sig. (2-tailed)	,519

a. Median

Sumber: Data yang telah diolah SPSS (2022).

Berdasarkan pengujian autokorelasi menggunakan *run test*, terlihat nilai signifikan sebesar 0,519 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan model regresi ini terbebas dari masalah autokorelasi, sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

Uji Regresi Berganda

Tabel 6.
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,276	,230		5,554	,000
	DD	,022	,041	,094	,543	,590
	DK	-,112	,046	-,442	-2,435	,020
	KA	-,090	,042	-,320	-2,135	,040

a. Dependent Variable: LEV

Sumber: Data yang telah diolah SPSS (2022).

Berdasarkan hasil dari uji analisis regresi berganda maka di dapatkan persamaan regresi yang disusun sebagai berikut:

$$LEV = 1,276 + 0,022.DD - 0,112.DK - 0,090.KA + \varepsilon$$

Dapat diperhatikan dalam persamaan pada regresi yang dimaksud jika penelitian ini mempunyai nilai konstanta (α) yakni sebanyak 1,276 yang artinya bahwa ketika variabel independen dan variabel dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit diasumsikan secara konstan atau memiliki nilai sebanyak 0, maka akan terjadi sebuah kenaikan di variabel kebijakan hutang yakni sebanyak 1,276. Nilai beta di X_1 (dewan direksi) yakni sebesar 0,022, hal tersebut mengartikan jika terdapat peningkatan sebanyak 1% yang terjadi di X_1 , maka terjadi peningkatan sebesar 0,022 di kebijakan hutang. Nilai beta di X_2 (dewan komisaris) yakni sebesar -0,112, hal tersebut mengartikan jika terdapat peningkatan sebanyak 1% yang terjadi di X_2 , maka terjadi penurunan sebesar -0,112 di kebijakan hutang. Nilai beta pada X_3 (komite audit) yakni sebesar -0,090, hal tersebut mengartikan jika ada peningkatan sebanyak 1% yang ada di X_3 , maka terjadi penurunan sebesar -0,090 pada kebijakan hutang.

Uji Simultan

Tabel 7.
Hasil Uji Simultan

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 hal 115-127

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,431	3	,810	6,393	,001 ^a
	Residual	4,436	35	,127		
	Total	6,867	38			

a. Predictors: (Constant), KA, DD, DK

b. Dependent Variable: LEV

Sumber: Data yang telah diolah SPSS (2022).

Menurut hasil pengujian simultan (pengujian F) bisa diketahui jika F hitung memiliki nilai 6,393 (F tabel sebanyak 2,87) bersama tingkatan secara signifikan sebanyak 0,001. Hal tersebut karena pada F hitung melebihi besar dari F pada tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05, artinya jika dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit memberikan pengaruh secara simultan pada kebijakan hutang.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,595 ^a	,354	,299	,3560112

a. Predictors: (Constant), KA, DD, DK

Sumber : Data yang telah diolah SPSS (2022).

Menurut uji koefisien determinasi (R) yakni sebanyak 0,595 menunjukkan jika hubungan antara dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit dengan kebijakan hutang ditetapkan mempunyai ikatan secara kuat, hal tersebut karena mempunyai nilai korelasi $> 0,50$. Kemudian, nilai *Adjusted R Square* (koefisien determinasi) hasil secara output pada datanya memberikan angka sebanyak 0,299 yang artinya jika variasi pada variabel kebijakan hutang bisa diuraikan oleh dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit yakni sebanyak 29,9%, kemudian terdapat sisa sebanyak 70,1% diuraikan oleh beberapa faktor lain yang tidak terdapat di penelitian ini.

Uji Parsial

Tabel 9.

Hasil Uji Parsial

Keterangan	Beta	t	Sig.	Hasil
Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit —>Kebijakan Hutang				
H ₁	0,022	0,543	0,590	Ditolak
H ₂	-0,112	-2,435	0,020	Diterima
H ₃	-0,090	-2,135	0,040	Diterima

Sumber: Data yang telah diolah SPSS (2022).

Sesuai hasil uji secara statistik pada t menunjukkan jika dewan direksi mempunyai t hitung $< t$ tabel yakni $0,543 < 2,0243$ dengan nilai secara signifikan sebesar $0,590 > 0,05$, maka bisa diartikan jika dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang. Dewan komisaris mempunyai t hitung $< t$ tabel yakni $-2,435 < 2,0243$ bersama nilai secara signifikan sebanyak $0,020 < 0,05$, maka bisa diartikan jika dewan komisaris memberikan pengaruh yang negatif terhadap kebijakan hutang. Komite audit mempunyai t hitung $< t$ tabel yakni sebanyak $-2,135 < 2,0243$ dengan

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 hal 115-127

nilai secara signifikan sebanyak $0,040 < 0,05$, maka bisa diartikan jika komite audit memberikan pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang.

Diskusi

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kebijakan Hutang

Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) variabel dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan pada kebijakan hutang, maka dari itu H_1 yaitu dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang **ditolak**. Banyak atau sedikitnya jumlah dewan direksi di perusahaan sub sektor makanan dan minuman tahun 2018-2020 tidak menjadikan manajemen untuk melakukan kebijakan hutang (Murtini, 2018). Karena jumlah dewan direksi bukan merupakan penilaian yang menjadi tolak ukur tingkat hutang perusahaan (Sunardi, 2019). Perusahaan yang memiliki jumlah dewan direksi yang besar bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memiliki kemampuan untuk menerima dana dari sumber pendanaan eksternal atau investor untuk menambahkan modal perusahaan, maka dari itu dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang (Aini *et. al.* 2021). Hal ini selaras dengan yang penelitian Murtini (2018) yang memberikan pernyataan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh pada kebijakan hutang.

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kebijakan Hutang

Berdasarkan pengujian secara parsial (pengujian t) variabel dewan komisaris memberikan pengaruh secara negatif pada kebijakan hutang, oleh karena itu H_2 yaitu dewan komisaris memberikan pengaruh secara negatif pada kebijakan hutang **diterima**. Perusahaan yang didalamnya memiliki anggota dewan komisaris dapat memotivasi dan memberi saran atau nasihat kepada manajer dan manajemen dalam menentukan kebijakan atau pengambilan keputusan (Novita dan Ardini, 2020). Dalam menggunakan kebijakan hutang secara tepat supaya tidak ada tingkatan hutang yang terbilang tinggi (Masithoh dan Dewayanto, 2020). Hal tersebut memberikan akibat perusahaan bisa mendapatkan ancaman *default* yakni tidak bisa memberikan pemenuhan hal yang sifatnya wajib membayar sebuah hutang secara tepat waktu (Novitasari *et. al.* 2021). Hal tersebut selaras yang diteliti oleh Aini *et. al.* (2021) yang memberikan penjelasan jika dewan komisaris memberikan pengaruh secara negatif pada kebijakan hutang.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Kebijakan Hutang

Berdasarkan pengujian secara parsial (pengujian t) bahwa variabel komite audit memberikan pengaruh secara negatif pada kebijakan hutang, maka dari itu, H_3 yakni komite audit memberikan pengaruh secara negatif pada kebijakan hutang **diterima**. Maka dengan hadirnya komite audit di perusahaan memiliki harapan mampu untuk memberikan partisipasi yang tinggi dalam mengimplementasikan pengelolaan perusahaan yang baik (Amaliyah dan Herwiyanti, 2019). Komite audit ditunjuk untuk memberikan perlindungan dengan maksimal pada pemilik perusahaan, dan membantu untuk melaksanakan fungsi dari pengawasan, yang meliputi *review* pada sebuah sistem pengendalian secara internal yang terdapat di perusahaan (Dewi dan Premashanti, 2020). Kualitas laporan keuangan di perusahaan dan efektivitas dari sebuah fungsi audit internal (Prayanthi dan Laurens, 2020). Hal tersebut selaras diteliti oleh Wardani dan Rumahorbo (2018) yang memberikan penjelasan jika komite audit memberikan pengaruh secara negatif pada kebijakan hutang.

KESIMPULAN

Data sampel pada penelitian ini sejumlah 39 laporan keuangan yang berasal dari 13 perusahaan pada sub sektor makanan dan minuman yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit memberikan pengaruh secara simultan pada kebijakan hutang. Selanjutnya, variabel dewan direksi tidak berpengaruh pada kebijakan hutang, variabel dewan komisaris dan komite audit memberikan pengaruh secara negatif pada kebijakan hutang.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan diantaranya pengamatan yang dipergunakan terbatas hanya dalam 13 perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2018 hingga 2020. Terdapat keterbatasan peneliti yang hanya menggunakan ukuran dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit sehingga kurang dapat hasil secara komprehensif. Selain

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 hal 115-127

itu, karakteristik dari dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit kurang disertakan secara spesifik seperti kompetensi, keahlian, dan pengalaman, oleh karena itu kepada peneliti selanjutnya di sarankan supaya tidak terbatas hanya di perusahaan sub sektor makanan dan minuman. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan perusahaan properti dan *real estate*, memperluas tahun pengamatan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat, selain itu disarankan untuk menggunakan indikator *good corporate governance* lainnya seperti kepemilikan institusional agar mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian ini.

Berdasarkan implikasi manajerial maka manajemen perusahaan sub sektor makanan dan minuman harus melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam mengelola kebijakan hutang agar tetap stabil dan terhindar dari gagal bayar yang dapat merugikan perusahaan. Sedangkan, bagi investor, investor sebaiknya melakukan *review* terhadap laporan keuangan suatu perusahaan untuk mendeteksi kondisi keuangan perusahaan tersebut dikelola dengan baik oleh manajemen perusahaan dalam mengeluarkan biaya operasional dan biaya lain-lain untuk mengurangi risiko tingkat hutang yang tinggi yang dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian.

REFERENSI

- Agatha, B. R., Nurlaela, S., dan Samrotun, Y. C. (2020). Kepemilikan Manajerial, Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan *Food and Beverage*. *E-Jurnal Akuntansi*, 30 (7), 1811. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p15>.
- Aini, N., Asmeri, R., dan Yuli Ardiani. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kebijakan Hutang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6 (11), 951–952, 3 (3), 5–24.
- Amaliyah, F., dan Herwiyanti, E. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Akuntansi*, 9 (3), 187–200. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.187-200>.
- Aminah, N. N., dan Wuryani, E. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9 (2), 337–352. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i2.29483>.
- Asim, A., dan Ismail, et al. (2019). *Impact Of Leverage On Earning Management: Empirical Evidence From The Manufacturing Sector Of Pakistan*. *Journal Of Finance and Accounting Research*, 01 (01), 70–91. <https://doi.org/10.32350/jfar.0101.05>.
- Daromes, F. E., dan Jao, R. (2020). Dewan Direksi Terhadap Reaksi Investor. *Jurnal Akuntansi*, 10 (1), 77–92.
- Dewi, I. G. A. A. O., dan Premashanti, N. M. N. (2020). Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik, Keberadaan Komite Audit, Dan *Prior Opinion* Terhadap Pemberian Opini Audit *Going Concern* Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (2), 133–142. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.2.133-142>.
- Erlie Nurliasari, K., dan Achmad, T. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9 (1), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Fionissa Noor Rizki. (2021). Pengaruh Asimetri Informasi, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Atma Jaya Accounting Research*, 04 (02), 187–204. <https://doi.org/10.35129/ajar.v4i02.188>.
- Gennusi, R. S. A., dan Maharani, N. K. (2021). *The Effect Of Investment Opportunity Set, Lagged Dividend And Managerial Ownership On Dividend Policy*. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 4 (1), 112–120. <https://doi.org/10.54783/japp.v4i1.418>.
- Ghozali. (2018). *A Pilot Study Of Corporate Governance And Accounting Fraud: The fraud Diamond Model*. *Journal Of Business And Retail Management Research*, 12 (2), 253–261. <https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is02/apsocgaftdm>.
- Hanafi, M., Husnan, S., dan Budiyanti, H. (2018). *The Effect Of Pyramidal Ownership Structure To*

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 hal 115-127

- The Financing Policies And Firm Value In Indonesia: Cronyman As Moderating Variable. Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10 (1), 1–12. <https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12878>.
- Indrati, M., Hermanto, Purwaningsih, E., Agustinah, W., dan Sarikha, A. (2021). *Corporate Governance Mechanisms And Possible Financial Statements Containing Fraud. Budapest International Research And Critics Institute Journal*, 4 (4), 8609–8621. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.2805>.
- Lestari, K. C., dan Wulandari, S. O. (2019). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2 (1), 20–35. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.7878>.
- Masithoh, S., dan Dewayanto, T. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9 (4), 1–9.
- Megawati, F. T., Umdiana, N., dan Nailufaroh, L. (2021). Faktor-Faktor Struktur Modal Menurut *Trade Off Theory*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26 (1), 55–67. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.255>.
- Murtini, U. (2018). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Kinerja Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 13 (2), 145. <https://doi.org/10.21460/jrak.2017.132.287>.
- Nana, dan Nurjanah, C. (2020). Analisis Jalur Struktur Modal Dan Nilai Perusahaan Dengan Metode *Trade Off Theory*. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13 (1), 132. <https://doi.org/10.35448/jrat.v13i1.7564>.
- Novita, I., dan Ardini, L. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan, *Good Corporate Governance* Dan Struktur Aset Terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9 (2), 1–18.
- Novitasari, B., Putra, A. M., dan Saebani, A. (2021). Pergantian Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24 (1), 60–78. <https://doi.org/10.35591/wahana.v24i1.262>.
- Nurfathirani, N., dan Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, dan Struktur Aset Terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9 (1), 1–17.
- Nurjanah, I., dan Purnama, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 1 (02), 260–269.
- Pasaribu, D. (2018). Pengujian Teori *Pecking Model* Dan *Trade Off* Dalam Analisis Struktur Modal Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110 (9), 1689–1699.
- Prayanthi, I., dan Laurens, C. N. (2020). *Effect Of Board Of Directors, Independent Commissioners, And Committee Audits On Financial Performance In The Food And Beverage Sector*. *Laurens Klabat Journal of Management*, 1 (1), 66–89.
- Purwaningsih, E., dan Gulo, Z. G. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Aset Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Akuntansi Unihaz:JAZ*, 3 (2), 196–209.
- Santosa, P. W. (2020). *The Effect Of Financial Performance And Innovation On Leverage: Evidence From Indonesian Food And Beverage Sector*. *Organizations and Markets in Emerging Economies*, 11 (22), 367–388. <https://doi.org/10.15388/OMEE.2020.11.38>.
- Sekaran, et. al. (2018). *Effect Of Corporate Governance On Financial Performance Of Deposit Money Banks In Nigeria*. *Pakistan Research Journal of Management Sciences*, 7 (5), 1–2. <http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptk%2B3rLJNuePfgeyx43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~media/amg/Documents/Policies and Strategies/S>.
- Siregar, H., dan Yusdiana. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko Bisnis, Profitabilitas, Dan Ukuran perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang Dan Kebijakan Dividen Serta Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimoderasi Oleh *Corporate Governance*. *Jurnal Manajemen Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI*, 21 (1), 25–35.
- Sunardi, N. (2019). Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.4 No.2 hal 115-127

- Leverage* Sebagai Variabel *Intervening* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018. *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*, 2 (3), 48–61. <https://doi.org/10.32493/frkm.v2i3.3397>.
- Supriadi, A. (2022). Pengaruh *Free Cash Flow*, *Sales Growth*, Dan Kebijakan Dividen Pada Kebijakan Hutang Perusahaan Properti Yang Ada Di Bursa Efek Indonesia. *Land Journal*, 3 (1), 87–101. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i1.1756>.
- Syahzuni, B. A. (2020). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 1–13.
- Umdiana, N., dan Claudia, H. (2020). Analisis Struktur Modal Berdasarkan *Trade Off Theory*. *Jurnal Akuntansi*, 7, 52–70.
- Wardani, D. K., dan Rumahorbo, H. D. S. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak, Tata Kelola Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya Hutang. *Jurnal Akuntansi*, 6 (2), 180–193. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.691>.